



**KECAMATAN SOMAGEDE  
KABUPATEN BANYUMAS**



# **RENCANA KERJA TAHUN 2024**



## KATA PENGANTAR

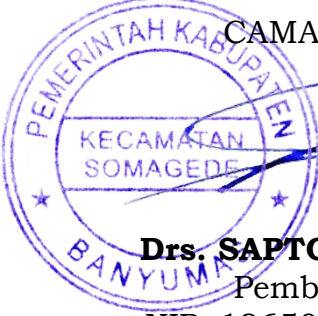
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Kecamatan Somagede telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2024 yang merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Somagede Tahun 2024 ini disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dan program kegiatan Kecamatan Somagede sebagai perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Somagede

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini belum sempurna sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan. Namun demikian kami berharap Rencana Kerja Kecamatan Somagede Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini kami ucapkan terima kasih.

Somagede, 29 September 2023

CAMAT SOMAGEDE  
  
**Drs. SAPTONO SUPRIYANTO**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650924 199503 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>5</b>
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum .....	6
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II.....</b>	<b>10</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Somagede Tahun 2022 ..... Dan Capaian Renstra Kecamatan Somagede .....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	37
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	44
<b>BAB III.....</b>	<b>49</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	49
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Somagede .....	50
3.2.1. Tujuan .....	50
3.2.2. Sasaran .....	50
3.3 Program Dan Kegiatan .....	53
<b>BAB IV.....</b>	<b>56</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>68</b>



# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**  
**Landasan Hukum**  
**Maksud dan Tujuan**  
**Sistematika Penulisan**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan Menyusun Renja Kerja ( Renja )

Rencana Kerja Kecamatan Somagede Tahun 2024 adalah Dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Somagede yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 ( satu ) tahun yaitu tahun 2024. Rencana Kerja Kecamatan Somagede merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Somagede yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )Kecamatan Somagede melakukan sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Rencana Kerja Kecamatan Somagede dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipasif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Rencana Kerja Kecamatan Somagede mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Kecamatan Somagede mengingat :

1. Secara substansial memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indicator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan,



- prakiraan maju yang dilaksanakan Kecamatan Somagede dalam 1 ( satu ) Tahun;
2. Secara normative menjadi acuan bagi Kecamatan Somagede untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA – PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran ( RKA );
  3. Secara Operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada unsur kewilayahan; dan
  4. Secara factual merupakan salah satu instrument evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Somagede dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas 2022
17. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023
18. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026
19. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Somagede adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan, beserta kebutuhan anggaran / pagu indikatif pada tahun 2024 berdasarkan penjabaran dari Renstra Kecamatan Somagede tahun 2024-2026

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Somagede sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Kecamatan Somagede;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahun yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Somagede Tahun 2024;
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Somagede tahun 2024, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematikan penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Somagede Tahun 2022, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Somagede Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 mengacu pada APBD Tahun 2023. Pencapaian target Renstra Kecamatan Somagede, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Somagede, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Somagede, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat.
3. BAB III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Somagede, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Somagede, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
4. BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Somagede, berisi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan kecamatan Somagede beserta indikator.
5. BAB V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Somagede.

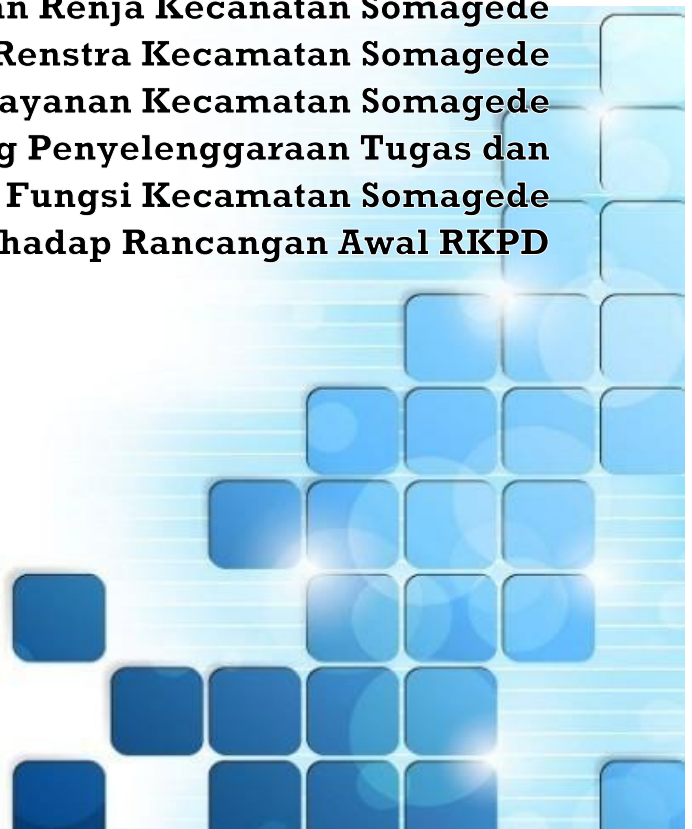




## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA KECAMATAN SOMAGEDE TAHUN 2022**

- **Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Somagede dan Capaian Renstra Kecamatan Somagede**
- **Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Somagede**
  - **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Somagede**
  - **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SOMAGEDE TAHUN 2022

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Somagede adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Somagede. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Somagede ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Somagede selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

*a. Penetapan Indikator Kinerja*

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

*b. Capaian Analisis Kinerja*

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SOMAGEDE TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SOMAGEDE**

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan sumber daya Pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara

sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam Upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Kecamatan Somagede pada tahun 2022 dan Pagu Anggaran 2023 disampaikan sebagai berikut:

#### Tahun Anggaran 2022

Jumlah anggaran Kecamatan Somagede Rp. 2.461.955.096,00 ( dua milyar empat ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu Sembilan puluh enam rupiah ) yang terbagi dalam 5 ( lima ) Program, 10 ( sepuluh ) kegiatan, 23 ( dua puluh tiga ) Sub kegiatan dari anggaran tersebut terealisasi 2.332.993.063,00 ( dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah ) atau sebesar 94,69%.

#### Tahun Anggaran 2023 ( Tahun Berjalan )

Jumlah anggaran penetapan Kecamatan Domagede sebesar Rp, 2.235.276.738,00 ( Dua milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah ) yang terbagi dalam 5 ( lima ) program, 10 ( sepuluh ) kegiatan dan 27 ( dua puluh tujuh ) sub kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2022. Kecamatan Somagede telah melaksanakan 94,69% dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang secara umum realisasi pencapaiannya sangat tinggi.

Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Banyumas dipresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun lalu dapat dilihat dalam Tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022  
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas**

OPD : KECAMATAN SOMAGEDE  
SUB OPD : KECAMATAN SOMAGEDE

Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD 2019- 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan 2021		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022						Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN		K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp								
3	4	4A																		
[TUJUAN]Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima																				
[INDTUJUAN]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		86	90.81	85		85		85			84.75		99.71		84.75			98.55	
[SASARAN]Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat																				
[INDSASARAN]	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	100		100		100			100		100		100			100	

Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD 2019- 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan 2021		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022					Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022		
[PROGRAM]X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																				
[INDPROGRAM]	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Pengggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100		100		100					100			100					100
[INDPROGRAM]	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100		100		100					100			100					100
[INDPROGRAM]	Persentase Barang Milk Perangkat Daerah yang mamadai	%	100		100		100					100			100					100



Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD 2019- 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan 2021						Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022	
[INDPROGRAM]	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100		100		100		100	
[KEGIATAN]X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							3.224.000		3.224.000		3.224.000		2.019.000		62.62			
[INDKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokum en	10		4		3		3		3		100		7		70	
[SUBKEGIATAN]X.X X.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							1.725.000		1.725.000		1.725.000		815.000		47.25			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokum en	15		5		5		5		5		100		10		66.67	

Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD 2019- 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan 2021		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022					Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022	
[SUBKEGIATAN]X.X X.01.2.0 1.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1.499.000	1.499.000	1.499.000	1.204.000	80.32								
[INDSUBKEGIATAN]	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	Keg	12	4	4	4	4	4	4	4	100	8	66.67						
[KEGIATAN]X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.662.640.916	1.662.640.916	1.662.640.916	1.629.413.668	98.6								
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	9	3	3	3	3	3	3	3	100	3	33.33						
[SUBKEGIATAN]X.X X.01.2.0 2.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							1.643.860.916	1.643.860.916	1.643.860.916	1.620.633.668	98.59								
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Orang	15	12	13	13	13	13	13	13	100	13	86.67						

Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD 2019- 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan 2021		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022					Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022	
[SUBKEGIA TAN]X.X X.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							18.780.000	18.780.000	18.780.000	18.780.000	100								
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	4	3	3	3		3	3	3	3	100	3	75					
[KEGIATAN]X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah							224.764.440	224.764.440	224.764.440	193.379.648	86.04								
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	18	6	6	6		6	6	6	100	6	33.33						
[SUBKEGIA TAN]X.X X.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							2.285.000	2.285.000	2.285.000	2.270.000	99.34								

Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD 2019- 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan 2021						Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	5		5		5		5		5		4		80		4		80			
[SUBKEGIATAN]X.X X.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												39.534.040		39.534.040		39.534.040		35.647.000		90.17	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	5		5		6		6		6		5		83.33		5		100			
[SUBKEGIATAN]X.X X.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												7.337.000		7.337.000		7.337.000		6.474.600		88.25	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	1		1		1		1		1		1		100		1		100			

Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD 2019- 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan 2021		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022					Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022	
[SUBKEGIA TAN]X.X X.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor							63.227.000		63.227.000		63.227.000		57.972.418		91.69				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	12	12		12		12			12		100		24		200	
[SUBKEGIA TAN]X.X X.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							19.016.400		19.016.400		19.016.400		16.817.600		88.44				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	4	4	4		4		4			3		75		3		75	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah pengandaan yang tersedia	lbr	90000	28030	25000		25000		25000			29888		119.55		57918		64.35	
[SUBKEGIA TAN]X.X X.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							93.365.000		93.365.000		93.365.000		74.198.030		79.47				



Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD 2019- 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan 2021		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022					Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	1450		400		120		120		120		186		155		586		40.41
[KEGIATAN]X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								7.250.000		7.250.000		7.250.000		7.075.000		97.59			
[INDKEGIATAN]	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	15		4		5		5		5		2		40		6		40
[SUBKEGIATAN]X.X X.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								7.250.000		7.250.000		7.250.000		7.075.000		97.59			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	5		6		2		2		2		2		100		8		160

Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD 2019- 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan 2021		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022					Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022		
[KEGIATAN]X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Pemanjang Urusan Pemerintahan Daerah								385.244.240		385.244.240		385.244.240		331.783.347		86.12				
[INDKEGIATAN]	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	2		2		2		2		2		2		100		2		100	
[SUBKEGIATAN]X.X X.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								36.183.000		36.183.000		36.183.000		33.027.687		91.28				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12		12		12		12		12		12		100		24		200	
[SUBKEGIATAN]X.X X.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								349.061.240		349.061.240		349.061.240		298.755.560		85.59				

Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD 2019- 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan 2021						Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	10		11		11		11		11		100		11		110	
[KEGIATAN]X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							43.964.000		43.964.000		43.964.000		33.892.500		77.09			
[INDKEGIATAN]	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	2		2		2		2		2		100		2		100	
[SUBKEGIATAN]X.X X.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							27.714.000		27.714.000		27.714.000		24.761.000		89.34			

Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD 2019- 2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022						Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2021		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	9	9	10		10		10		10		100		10		111.11
[SUBKEGIATAN]X.X X.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya					16.250.000		16.250.000		16.250.000		9.131.500		56.19			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	25	19	20		20		20		44		220		63		252
[PROGRAM]PROGR AM						27.350.000		27.350.000		27.350.000		26.557.000		97.1			
	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
[INDPROGRAM]	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100		100		100		100		100		100		100

Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD 2019- 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan 2021		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022						Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022	
[KEGIATAN]Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							27.350.000	27.350.000	27.350.000			26.557.000	97.1						
[INDKEGIATAN]	Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan	Jenis	2	2	2		2	2			2	100	2	100					
[SUBKEGIATAN]Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan							8.250.000	8.250.000	8.250.000			8.187.500	99.24						
[INDSUBKEGIATAN]	pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani	Orang	1	1500	2000		2000	2000			2822	141.1	4322	432200					
[SUBKEGIATAN]Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							19.100.000	19.100.000	19.100.000			18.369.500	96.18						



Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD 2019- 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan 2021		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022					Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	Desa	9		9		9		9		9		9		100		9		100	
[PROGRAM]PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							68.057.500		68.057.500		68.057.500		62.317.500		91.57					
[INDPROGRAM]	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100	
[KEGIATAN]Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							68.057.500		68.057.500		68.057.500		62.317.500		91.57					
[INDKEGIATAN]	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Desa	9		9		9		9		9		9		100		9		100	

Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD 2019- 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan 2021		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022					Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022	
[SUBKEGIA TAN]Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							18.820.000	18.820.000	18.820.000	17.545.000	93.23								
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	810	270	500	500	500	482	96.4	75.2	92.84								
[SUBKEGIA TAN]Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							34.237.500	34.237.500	34.237.500	31.336.500	91.53								
[INDSUBKEGIATAN]	Frekuensi rapat rapat terkait pemberdayaan masyarakat	Kali	96	24	36	36	36	36	100	60	62.5								

Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD 2019- 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan 2021		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022					Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022	
[SUBKEGIATAN]Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pembudayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							15.000.000		15.000.000		15.000.000		13.436.000		89.57				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kegiatan fasilitasi pembudayaan masyarakat	Keg	36		12	12			12			12		100		24		66.67	
[PROGRAM]PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							8.680.000		8.680.000		8.680.000		7.970.000		91.82				
[INDPROGRAM]	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100		100	100			100			100		100		100		100	
[KEGIATAN]Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			

Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD 2019- 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan 2021		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022					Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022		
[INDKEGIATAN]	Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Keg	12		4		4			4				N/A		0		4		N/A
[SUBKEGIATAN]	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kegiatan pembinaan Linmas	Keg	1				1			1				N/A		0				N/A

Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD 2019- 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan 2021		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022					Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022	
[KEGIATAN]Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
[INDIKATOR]	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Keg	12	4	4		4		4		4		4		100		8		66.67
[SUBKEGIATAN]Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								8.680.000		8.680.000		8.680.000		7.970.000		91.82			

Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD 2019- 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan 2021		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022					Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum di wilayah kecamatan	unsur	15	5	5			5		5		5		100		5		33.33	
[SUBKEGIATAN]	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
[INDSUBKEGIATAN]	Frekwensi Rakor dengan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat	Kali	12		12			12		12		N/A		0				N/A	
[PROGRAM]	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							30.780.000		30.780.000		30.780.000		28.748.000		93.4			

Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD 2019- 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan 2021		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022						Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022		
[INDPROGRAM]	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	100	100			100			100			100			100			100	
[KEGIATAN]Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								30.780.000			30.780.000			30.780.000			28.748.000			93.4	
[INDKEGIATAN]	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Desa	9	9	9			9			9			9			100			9	100
[SUBKEGIATAN]Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																					

Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD 2019- 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan 2021		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022					Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Pendes dan perkades yang tertaslitasi	Dokum en	72		36		36		36		N/A		0				N/A	
[SUBKEGIATAN]	Fasili tasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						27.900.000		27.900.000		27.900.000		26.925.500		96.51			
[INDSUBKEGIATAN]	Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes	Kali	57	19	36		36		36		36		100		55		96.49	
[SUBKEGIATAN]	Fasili tasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																	
[INDSUBKEGIATAN]	Frekuensi Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kali	15	10	0		0		0		N/A				10		N/A	



Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD 2019- 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan 2021						Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d/ Tahun 2022	
[SUBKEGIA TAN] Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Desa yang menyampaikan usulan desa ke Kabupaten	Desa	9		9		9		9		N/A		0				N/A	
[SUBKEGIA TAN] Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan							2.880.000		2.880.000		2.880.000		1.822.500		63,28			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan	Desa	9		9		9		9		9		100		9		100	

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, adalah sebagai berikut:

### 1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

### 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
  1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- a. koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
    - 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
    - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
    - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
    - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
  - b. koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
    - 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan ;
    - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
    - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;
  - c. koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
    - 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
    - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
  - d. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
    - 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau
    - 2) pemeliharaan prasarana instansi vertikal yang terkait;
    - 3) pelaksanaan dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
    - 4) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
  - e. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
    - 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
    - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan

- 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
  - 4) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- f. pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
- 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah; dan
  - 5) penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
  - 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas terdiri dari:
- 1) Camat;
  - 2) Sekretariat, terdiri dari:
    - i. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
    - ii. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - 3) Seksi Pemerintahan Desa;
  - 4) Seksi Pelayanan;
  - 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - 6) Seksi Ekonomi Pembangunan;
  - 7) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - 8) Kelompok jabatan fungsional;

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas**

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2022	Target 2023
<b>PROGRAM 1</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.1	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100
<b>PROGRAM 2</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>				
2.1	Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100
<b>PROGRAM 3</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				
3.1	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100
<b>PROGRAM 4</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>				
4.1	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	100	100
<b>PROGRAM 5</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
5.1	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100
5.2	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100
5.3	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100
5.4	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100

Sumber : E-monev Form 4 Triwulan 4

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Kecamatan Somagede - Kabupaten Banyumas

NO	Indikator	SPM/stan dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan			82	83	84	85	83,72	90,81	85	86	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kota;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat terhadap program KB.
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
4. Belum pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan kelurahan;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat kelurahan dan kecamatan.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa.
8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa.
9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
10. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat
11. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Somagede sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten di bidang TIK dan kehumasan serta kerumahtanggaan;

2. Akses informasi yang belum merata dan kurang optimalnya sarana komunikasi yang ada dalam penyelenggaraan diseminasi informasi;
3. Ketersediaan jaringan internet dan intranet masih kurang;
4. Belum adanya integrasi data dan sistem informasi antar perangkat daerah;
5. Data Aset dan Barang Daerah Milik Kecamatan masih belum lengkap;
6. Kurangnya staf permas karena beban kerja kasi permas yang tinggi;
7. Terkait dengan Tusi PKK masih belum optimal karena belum adanya staf teknis yang mengurus hal tersebut;
8. Banyaknya permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat di wilayah desa yang harus di follow up namun keterbatasan tenaga menjadi tidak bisa tercover semuanya;
9. Belum sinerginya perangkat desa yang membidangi permas dan kesra dengan seksi permas;
10. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan
11. Kurang optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan ditingkat kecamatan.
12. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan .
13. Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan;
14. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
15. Belum adanya sinkronisasi dalam aplikasi sistem data kependudukan antara kecamatan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
16. Sinergitas dengan Pendamping Desa perlu ditingkatkan
17. Kurangnya staf yang menguasai pemerintahan;
18. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan ke Desa
19. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional linmas dalam menjalankan tugas (kendaraan patroli, pos satlinmas);
20. Kurangnya jumlah anggota linmas kecamatan dan kurangnya kemampuan ketrampilan Satlinmas dalam mendukung tugas dan fungsi;
21. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat.
22. Info kegiatan terkait kecamatan belum optimal
23. Personel yang harus keliling
24. Masih kurangnya SDM yang berkualitas sehingga pekerjaan masih sering terhambat
25. Masih adanya personil yang belum bekerja sesuai dengan Tusnya.
26. Masih rendahnya kualitas SDM dibidang pengelolaan keuangan
27. Seharusnya yang menduduki jabatan perencanaan dan keuangan selayaknya mempunyai pengetahuan dan IT sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan IT bisa di terselesaikan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Soamede menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT

(Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Somagede Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. Strength (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik.
2. SDM Kantor Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 23 orang ( 12 PNS dan 11 Non PNS ) yang terdiri dari : pendidikan S-2 sebanyak 3 orang, S-1 sebanyak 7 orang, Pendidikan D3 sebanyak 1 orang, Pendidikan SMA sebanyak 6 orang, Pendidikan SD sebanyak 1 Orang Dilihat dari pendidikan reguler, pegawai Kecamatan Somagede sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam urusan pemerintahan daerah.
3. Sarana dan Prasarana  
Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Somagede sudah cukup memadai, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak.
4. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah.

B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah, Kecamatan Somagede juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Tanah yang ditempati milik Desa Somagede, bukan milik Pemkab Banyumas ;
2. Kurangnya jumlah ASN dan masih belum banyak yang menguasai IT
3. Masih kurangnya disiplin ASN
4. Masih sering terjadi tumpang tindih tupoksi
5. Kebersihan Kantor perlu ditingkatkan

C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di. Peluang-peluang tersebut adalah

1. Pemberian beasiswa dari Pemda Banyumas untuk meningkatkan jenjang pendidikan.



2. Tersedianya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
3. Adanya kemauan dan keinginan dari karyawan dan karyawan untuk meningkatkan kemampuan.
4. Adanya kerjasama dengan Desa atau pihak lain untuk menyediakan data yang dibutuhkan.
5. Adanya keinginan untuk menyusun perencanaan yang baik dari berbagai pihak.
6. Adanya dukungan dari masyarakat dan legislatif
7. Adanya kebutuhan dan tuntutan akan pembangunan yang jelas dan terarah.
8. Semakin banyak pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat
9. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
10. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada kecamatan yang lebih besar
11. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.

#### D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Kecamatan Somagede tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah. Ancaman yang mungkin akan terjadi antara lain:

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.
2. Adanya aturan-aturan yang menghambat pengembangan karier pegawai.
3. Adanya bencana alam yang sering terjadi di Banyumas (tanah longsor, banjir, angin puting beliung).
4. Kurangnya etos kerja
5. Tingginya tingkat pengangguran
6. Tingginya jumlah penduduk miskin
7. Tingginya ancaman bencana
8. Rendahnya semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat.

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Somagede yang membantu Bupati Banyumas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah bidang pelayanan publik, sehingga semakin professional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bidang administrasi pemerintahan di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi pemerintahan
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan di kecamatan
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas penyelenggaraannya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Somagede dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;

3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurangnya optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/ tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

### ***Tugas Kecamatan Somagede***

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

### ***Fungsi***

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan Perijinan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban serta kelurahan;
2. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;

3. Melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
4. Melaksanakan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
6. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
7. Melaksanakan fungsi kesekretariatan kecamatan;
8. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Isu-isu penting untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Somagede pada tahun 2023 adalah:

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kota;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat program KB.
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
4. Belum pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan terhadap anak di tingkat kecamatan dan kelurahan;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat kelurahan dan kecamatan.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa.
8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa.
9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
10. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat
11. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Somagede tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Somagede pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima melalui pemenuhan, penerapan SOP dan PATEN.
2. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Ancaman dalam Ketetraman, Ketertiban dan Kebencanaan
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Memberdayakan dan Membina Kader PKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
7. Melakukan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes
8. Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan.
9. Mewujudkan ASN yang melek teknologi informasi khususnya terkait aplikasi yang berhubungan dengan E-Office

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dari rancangan awal RKPD Kecamatan Somagede telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Somagede Tahun 2018-2023 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rancangan Renja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan Awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/ tolok ukur dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/ kegiatan yang merupakan repersentasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Somagede dan Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan pembiayaan penerimaan daerah berikut pendanaan indikatif.

Untuk lebih jelasnya mengenai rancangan awal RKPD Kecamatan Somagede Tahun 2024 dapat dilihat Tabel 2.3.di Bawah ini

**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( RENJA )  
KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024**

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
<b>KECAMATAN SOMAGEDE</b>			2,550,727,000				2,609,682,000		
7	UNSUR KEWILAYAHAN		224,163,500				243,113,500		
7.01	KECAMATAN		224,163,500				243,113,500	KECAMATAN	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Indeks	45,200,000			86 Indeks	45,200,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100%	3,600,000	Kab. Banyumas		100%	3,600,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	3,600,000	Kab. Banyumas		4 Laporan	3,600,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	100%	6,250,000	Kab. Banyumas		100%	6,250,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	6,250,000	Kab. Banyumas		4 Laporan	6,250,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	100%	8,000,000	Kab. Banyumas		100%	8,000,000	KECAMATAN SOMAGEDE

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR PROGRAM/	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	8,000,000	Kab. Banyumas		1 Dokumen 8,000,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	27,350,000	Kab. Banyumas		100% 27,350,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	8,250,000	Kab. Banyumas		12 Laporan 8,250,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9 Laporan	19,100,000	Kab. Banyumas		9 Laporan 19,100,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>85,807,500</b>			<b>100%</b> <b>85,807,500</b>	<b>KECAMATAN SOMAGEDE</b>
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100%	68,057,500	Kab. Banyumas		100% 68,057,500	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	18,820,000	Kab. Banyumas		6 Lembaga Kemasyarakatan 18,820,000	KECAMATAN SOMAGEDE



URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR PROGRAM/	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	15,000,000	Kab. Banyumas		4 Dokumen	15,000,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	34,237,500	Kab. Banyumas		4 Laporan	34,237,500	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase fasilitasi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100%	17,750,000	Kab. Banyumas		100%	17,750,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	6,250,000	Kab. Banyumas		4 Lembaga Kemasyarakatan	6,250,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	11,500,000	Kab. Banyumas		2 Laporan	11,500,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas</b>	<b>100%</b>	<b>15,920,000</b>			<b>100%</b>	<b>15,920,000</b>	<b>KECAMATAN SOMAGEDE</b>
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100%	15,920,000	Kab. Banyumas		100%	15,920,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	12,500,000	Kab. Banyumas		4 Laporan	12,500,000	KECAMATAN SOMAGEDE

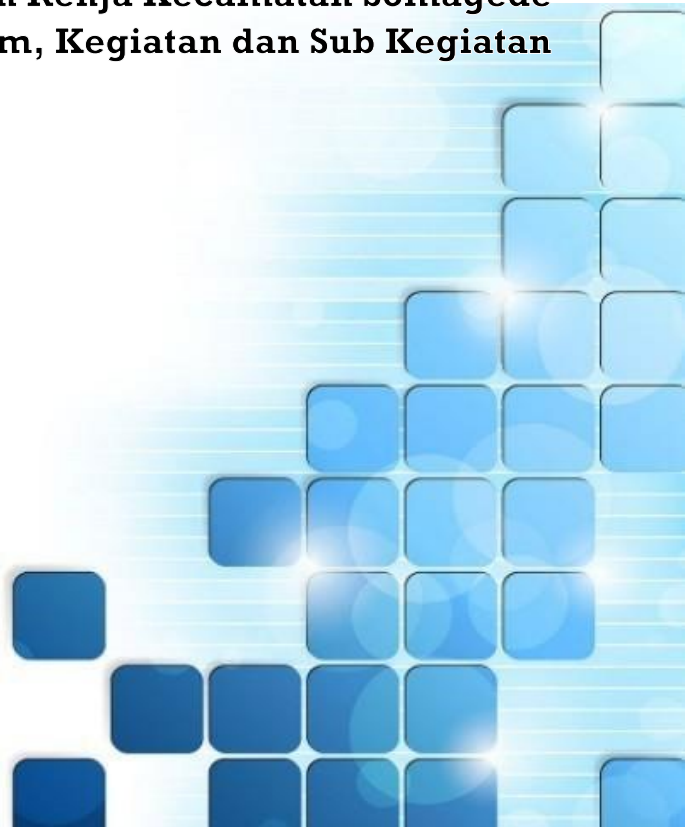




## **BAB III**

# **TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SOMAGEDE**

**Telaah Terhadap Kebijakan Nasional  
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Somagede  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**



## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Prioritas Pembangunan daerah tahun 2024 pada dasarnya adalah gambaran prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005 – 2025 dan RPD 2024-2025. Selain itu prioritas Pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan Pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan daerah. Untuk dapat mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penyusunan RPD memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Propinsi Jawa Tengah, mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 serta menyelaraskan dengan Kebijakan Nasional dan regulasi terkait lainnya.

Tema Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2023 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural “** Dalam Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2023 ada 7 prioritas Nasional yang ditetapkan oleh pemetintah dalam RKP 2023 yang mana kebijakannya diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperluas Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan ( Polhukhankam ) dan Transformasi Pelayanan Publik

Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2023 ditujukan pada “ **Peningkatan perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia .**” dengan prioritas daerah diarahkan pada :

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan berkelanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
4. Pemantapan tata Kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapaditas dan ketahanan fiskal daerah.

### **Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2024**

Sesuai RPD Tahun 2024-2026, prioritas Pembangunan Daerah menjadi agenda Pembangunan pemerintahan daerah tahunan yang menjadi capaian antara menuju sasaran 3 ( Tiga ) Tahunan RPD. Prioritas Pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai bagian dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dirumuskan secara bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas Pembangunan di tingkat provinsi maupun tingkat Nasional.

## **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SOMAGEDE**

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Kecamatan Somagede Tahun 2024-2026 mendasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

### **3.2.1. Tujuan**

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas selama periode Renstra tahun 2024-2026 adalah : “**Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas**“

### **3.2.2. Sasaran**

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan;
2. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan kecamatan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas beserta indikator kinerjanya disajikan pada tabel 3.1 sebagaimana berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
					2023 Tw 2	2024	2025	2026	s/d 2026
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50%*Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan + 50%*Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan	%	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	(20%*realisasi program pengawasan desa)+(20%*realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik)+(20%*realisasi program pemberdayaan masyarakat)+(20%*realisasi program trantibum)+(20%*realisasi program pemerintahan umum)	%	100	100	100	100	100
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	79,6	79,8	80	80	80

Sumber: e RPD Tahun 2024-2026

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan SKPD kami dalam merumuskan program dan kegiatan, adalah disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi SKPD juga ada pertimbangan lain seperti :

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
  1. Pencapaian SDGs,
  2. Pengentasan kemiskinan,
  3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
- b. Dengan adanya pertimbangan – pertimbangan melalui desk rancangan awal RKPD 2024, kami telah menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja tahun 2024 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pagu : Rp. **2.326.563.500,00**

**Kegiatan :**

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 1.952.000,00
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 1.749.101.793,00
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 125.646.400,00
- d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 31.000.000,00
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 376.240.307,00
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 42.623.000,00-

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

Pagu : Rp. **45.200.000,00**

**Kegiatan :**

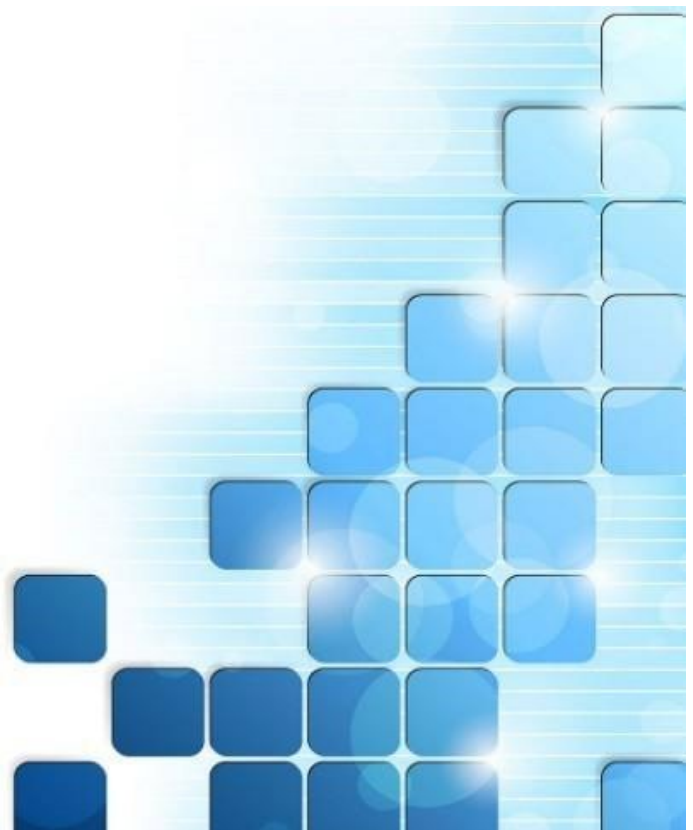
- a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
Pagu Anggaran : Rp. 3.600.000,00

- b) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan  
Pagu Anggaran : Rp. 6.250.000,00
  - c) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  
Pagu Anggaran : Rp. 8.000.000,00
  - d) Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  
Pagu Anggaran : Rp. 27.350.000,00
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  
Pagu : **Rp. 85.807.500,00**
- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  
Pagu Anggaran : Rp. 68.057.500,00
  - b) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  
Pagu Anggaran : Rp. 17.750.000,00
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
Pagu : **Rp. 15.920.000,00**
- a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
Pagu Anggaran : Rp. 15.920.000,00
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  
Pagu : **Rp. 23.500.000,00**
- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 23.500.000,00
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  
Pagu : **Rp. 53.736.000,00**
- a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
Pagu Anggaran : Rp. 53.736.000,00



## **BAB IV**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**





## **BAB IV**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif yang dapat menggambarkan capaian kinerja.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Pengadaan Mebel

- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Pemeliharaan Mebel
  - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
  - 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
  - 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
  - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
  - 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

## **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- 2) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
  - 3) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- 1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
  - 2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

#### **4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
  - 2) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

#### **5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 3) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
  - 4) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

#### **6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
  - 2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
  - 3) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
  - 4) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
  - 5) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

**MATRIK TAHUN 2024 – 2025 BERDASARKAN RPD 2024-2026**  
**KECAMATAN SOMAGEDE**

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELO MPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
KECAMATAN SOMAGEDE				2,550,727,000			2,609,682,000		
7	UNSUR KEWILAYAHAN			224,163,500			243,113,500		
7.01	KECAMATAN			224,163,500			243,113,500	KECAMATAN	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Indeks	45,200,000			86 Indeks	45,200,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100%	3,600,000	Kab. Banyumas		100%	3,600,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	3,600,000	Kab. Banyumas		4 Laporan	3,600,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	100%	6,250,000	Kab. Banyumas		100%	6,250,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	6,250,000	Kab. Banyumas		4 Laporan	6,250,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	100%	8,000,000	Kab. Banyumas		100%	8,000,000	KECAMATAN SOMAGEDE



URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR PROGRAM/	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH
						2025		
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	8,000,000	Kab. Banyumas		1 Dokumen 8,000,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	27,350,000	Kab. Banyumas		100% 27,350,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	8,250,000	Kab. Banyumas		12 Laporan 8,250,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9 Laporan	19,100,000	Kab. Banyumas		9 Laporan 19,100,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	85,807,500			100% 85,807,500	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100%	68,057,500	Kab. Banyumas		100% 68,057,500	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	18,820,000	Kab. Banyumas		6 Lembaga Kemasyarakatan 18,820,000	KECAMATAN SOMAGEDE

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR PROGRAM/	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	15,000,000	Kab. Banyumas		4 Dokumen	15,000,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	34,237,500	Kab. Banyumas		4 Laporan	34,237,500	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase fasilitasi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100%	17,750,000	Kab. Banyumas		100%	17,750,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	6,250,000	Kab. Banyumas		4 Lembaga Kemasyarakatan	6,250,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	11,500,000	Kab. Banyumas		2 Laporan	11,500,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100%	15,920,000			100%	15,920,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100%	15,920,000	Kab. Banyumas		100%	15,920,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	12,500,000	Kab. Banyumas		4 Laporan	12,500,000	KECAMATAN SOMAGEDE



URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR PROGRAM/	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	3,420,000	Kab. Banyumas		2 Laporan	3,420,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100%	23,500,000			100%	23,500,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	100%	23,500,000	Kab. Banyumas		100%	23,500,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45 Orang	6,000,000	Kab. Banyumas		45 Orang	6,000,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	17,500,000	Kab. Banyumas		2 Dokumen	17,500,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APB Des tepat waktu	100%	53,736,000			100%	72,686,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100%	53,736,000	Kab. Banyumas		100%	72,686,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	17,500,000	Kab. Banyumas		4 Dokumen	25,000,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	21,266,000	Kab. Banyumas		12 Dokumen	17,500,000	KECAMATAN SOMAGEDE



URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR PROGRAM/	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH	
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0	Kab. Banyumas		1 Dokumen	15,216,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	3,600,000	Kab. Banyumas		2 Dokumen	3,600,000	KECAMATAN SOMAGEDE
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	11,370,000	Kab. Banyumas		2 Laporan	11,370,000	KECAMATAN SOMAGEDE
X	NON URUSAN			2,326,563,500				2,366,568,500	
X.XX	NON URUSAN			2,326,563,500				2,366,568,500	KECAMATAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	2,326,563,500			100%	2,366,568,500	KECAMATAN SOMAGEDE
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	1,952,000	Kab. Banyumas		4 Dokumen	2,821,000	KECAMATAN SOMAGEDE
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	880	Kab. Banyumas		3 Dokumen	1,255,000	KECAMATAN SOMAGEDE
X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,072,000	Kab. Banyumas		1 Laporan	1,566,000	KECAMATAN SOMAGEDE
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	1,749,101,793	Kab. Banyumas		100%	1,749,101,793	KECAMATAN SOMAGEDE
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1,728,221,793	Kab. Banyumas		13 Orang/bulan	1,728,221,793	KECAMATAN SOMAGEDE
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	20,880,000	Kab. Banyumas		4 Dokumen	20,880,000	KECAMATAN SOMAGEDE

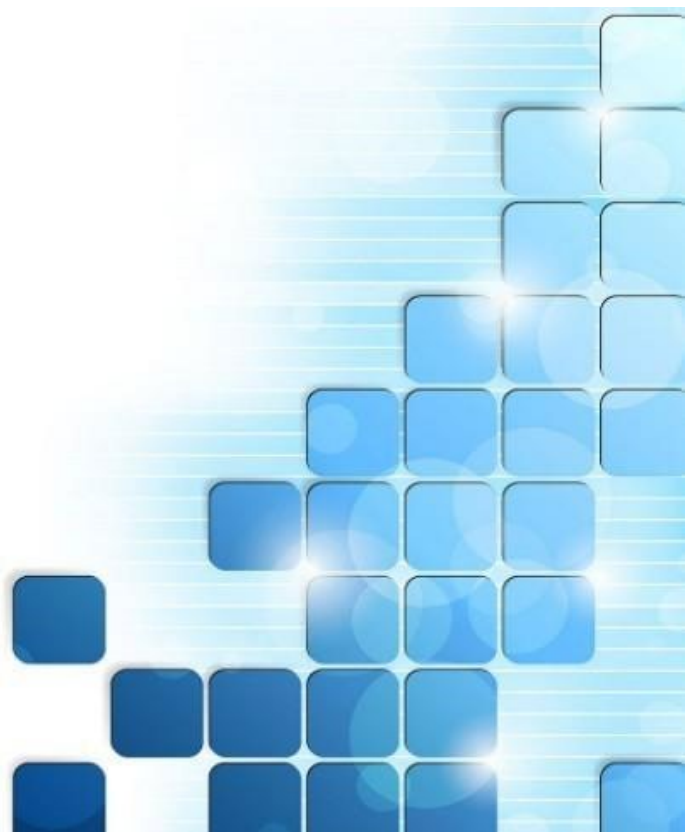
URUSAN/URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR PROGRAM/	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH	
						2025			
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%	125,646,400	Kab. Banyumas		100%	149,541,207	KECAMATAN SOMAGEDE
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2,394,000	Kab. Banyumas		4 Paket	2,394,000	KECAMATAN SOMAGEDE
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	21,200,700	Kab. Banyumas		4 Paket	23,686,107	KECAMATAN SOMAGEDE
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3,171,000	Kab. Banyumas		4 Paket	3,171,000	KECAMATAN SOMAGEDE
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	52,988,000	Kab. Banyumas		12 Paket	52,988,000	KECAMATAN SOMAGEDE
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	11,437,100	Kab. Banyumas		4 Paket	11,437,100	KECAMATAN SOMAGEDE
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	25,955,600	Kab. Banyumas		12 Laporan	43,365,000	KECAMATAN SOMAGEDE
X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	8,500,000	Kab. Banyumas		2 Dokumen	12,500,000	KECAMATAN SOMAGEDE
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100%	31,000,000	Kab. Banyumas		100%	23,992,000	KECAMATAN SOMAGEDE
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	15,000,000	Kab. Banyumas		2 Unit	11,992,000	KECAMATAN SOMAGEDE
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	16,000,000	Kab. Banyumas		5 Unit	12,000,000	KECAMATAN SOMAGEDE

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR PROGRAM/	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%	376,240,307	Kab. Banyumas		100%	395,989,500	KECAMATAN SOMAGEDE
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30,173,965	Kab. Banyumas		12 Laporan	36,183,000	KECAMATAN SOMAGEDE
X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	27,482,182	Kab. Banyumas		4 Laporan	34,323,000	KECAMATAN SOMAGEDE
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	318,584,160	Kab. Banyumas		12 Laporan	325,483,500	KECAMATAN SOMAGEDE
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	42,623,000	Kab. Banyumas		100%	45,123,000	KECAMATAN SOMAGEDE
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	21,714,000	Kab. Banyumas		10 Unit	21,714,000	KECAMATAN SOMAGEDE
X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	5,000,000	Kab. Banyumas		2 Unit	5,000,000	KECAMATAN SOMAGEDE
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	10,909,000	Kab. Banyumas		16 Unit	10,909,000	KECAMATAN SOMAGEDE
X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5,000,000	Kab. Banyumas		2 Unit	7,500,000	KECAMATAN SOMAGEDE



## **BAB V**

# **PENUTUP**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dalam jangka waktu 1 ( satu ) tahun, dengan menyesuaikan dinamika organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini serta mengacu pada Renstra Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Rencana Kerja Kecamatan Somagede memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 ( satu ) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih **indikatif** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaan / anggaran yang tersedia.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD – Renstra PD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariay, seksi dan seluruh staf kecamatan Somagede secara Bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
  - a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
  - b. Menjaga konsistensi Renstra, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA )
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

Demikian Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Somagede Tahun 2024 dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan pada Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Somagede Tahun 2024 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Renja Kerja Kecamatan Somagede Tahun 2024 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika Pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, perlu Langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Kecamatan Somagede Tahun 2024 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Kecamatan Somagede Tahun 2024.

CAMAT SOMAGEDE  
KABUPATEN BANYUMAS

**Drs. SAPTONO SUPRIYANTO**

Pembina Tingkat I

NIP. 19650924 199503 1 002